

## Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Tangerang

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ilham Pratama Putra Universitas Muhamadiyah Jakarta ilhamlava9@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Naila Nur Aziza Universitas Muhammadiyah Jakarta naylanrazza@gmail.com	
Nasya Rafika Putri Universitas Muhammadiyah Jakarta nasyarafika585@gmail.com	
Tsabitha Naura Kamila Universitas Muhammadiyah Jakarta tsabithanaura4@gmail.com	
Ghina Halwa Mufidah Universitas Muhammadiyah Jakarta halwamufidahghina@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Pratama, I., Aziza, N. N., Putri, N. R., Kamila, T. N., & Mufidah, G. H. (2025). Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Tangerang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5288-5294.

### **Abstrak**

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang mencakup ketersediaan, distribusi, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan program peningkatan ketahanan pangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Kajian dilakukan terhadap program urban farming dengan sistem hidroponik 1.000 lubang tanam sebagai inovasi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan alih fungsi lahan, urbanisasi, dan pertumbuhan penduduk. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam memperkuat ketahanan pangan perkotaan. Faktor pendukung keberhasilan program meliputi dukungan regulasi yang jelas, penyediaan sarana produksi dan pelatihan teknis, partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi teknologi hidroponik. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan lahan, kesulitan teknis dalam adopsi teknologi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya adaptasi masyarakat terhadap inovasi baru. Integrasi kebijakan publik, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian pangan dan memperkuat food resilience di tingkat keluarga hingga komunitas. Penelitian ini merekomendasikan strategi holistik yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik sebagai model penguatan ketahanan pangan perkotaan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** ketahanan pangan, urban farming, hidroponik, kebijakan publik, pemerintah daerah, Kota Tangerang

## Abstract

Food security is a strategic issue encompassing availability, distribution, accessibility, and sustainable utilization of food. This study aims to analyze the role of Tangerang City Government in implementing food security enhancement programs and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The research focuses on the urban farming program with 1,000 hydroponic planting holes as a local government innovation to address challenges of agricultural land conversion, urbanization, and population growth. The research method employs a qualitative descriptive approach with data collection through literature review and policy document analysis. The findings indicate that Tangerang City Government plays roles as regulator, facilitator, and coordinator in strengthening urban food security. Supporting factors for program success include clear regulatory support, provision of production facilities and technical training, active community participation, cross-sector collaboration, and hydroponic technological innovation. Meanwhile, inhibiting factors encompass land limitations, technical difficulties in technology adoption, resource constraints, and low community adaptation to new innovations. The integration of public policy, technological innovation, and community empowerment proves effective in enhancing food self-sufficiency and strengthening food resilience from household to community levels. This research recommends a holistic strategy integrating social, economic, technological, and public policy aspects as a model for sustainable urban food security enhancement.

**Keywords:** foodsecurity, urban farming, hydroponics, public policy, local government, Tangerang City

## A. Pendahuluan

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi di mana pangan tersedia secara cukup bagi seluruh warga negara, yang mencakup kuantitas dan kualitas pangan yang memadai, aman dikonsumsi, beragam, bergizi, merata, terjangkau, serta sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara adil dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara konsisten.

Konsep ketahanan pangan menekankan bahwa setiap individu harus memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama target yang berkaitan dengan penghapusan kelaparan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan indikator penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang layak dan menjamin hak asasi manusia atas pangan yang memadai.

Di Indonesia, tantangan ketahanan pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada meratanya distribusi pangan, kemudahan akses masyarakat terhadap pangan, serta efektivitas pemanfaatannya. Di kota-kota besar seperti Kota Tangerang, tantangan ini semakin kompleks akibat beberapa faktor, antara lain alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan fasilitas umum, pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, urbanisasi yang cepat, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan. Sebagai contoh, data dari Provinsi Banten menunjukkan adanya fluktuasi pada indeks ketahanan pangan di Kota Tangerang selama beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan dinamika tantangan pangan di perkotaan.

Pemerintah daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung ketahanan pangan lokal. Salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang adalah program urban farming berupa bantuan 1.000 lubang tanam hidroponik. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan kosong sebagai media produksi pangan lokal, sehingga dapat mengatasi menyusutnya lahan pertanian aktif dan meningkatkan kemandirian pangan masyarakat perkotaan.

Peran pemerintah dalam konteks ini meliputi beberapa aspek, antara lain: penyusunan regulasi dan kebijakan terkait ketahanan pangan, fasilitasi dan pendampingan masyarakat

dalam produksi pangan lokal, koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Melalui pendekatan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan daerah, pemerintah berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak masyarakat dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi program ini. Hambatan tersebut antara lain kerumitan teknis pelaksanaan, keterbatasan lahan dan sumber daya, serta kesiapan masyarakat dalam mengadopsi inovasi baru. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat, kemampuan adaptasi terhadap inovasi, dan kolaborasi antara berbagai sektor.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui urban farming hidroponik mencerminkan strategi integratif yang memadukan kebijakan publik, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara merata, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Menganalisis peran pemerintah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan program peningkatan ketahanan pangan,

Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program ketahanan pangan di Kota Tangerang.

Suryana (2014) menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut aspek keterjangkauan dan kestabilan distribusinya bagi seluruh masyarakat. Tiga pilar utama dalam konsep ini mencakup ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Di wilayah perkotaan, ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Handayani (2021), keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menjalin koordinasi lintas sektor, seperti pertanian, perdagangan, dan kesejahteraan sosial. Pemerintah berperan bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak dan pendukung dalam membangun sistem pangan yang tangguh. Namun, di tingkat kota, upaya ini kerap terhambat oleh keterbatasan lahan, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain, dan lemahnya sinergi antarinstansi terkait.

Sementara itu, Nurhayati dan Fadli (2022) menyoroti bahwa diversifikasi pangan lokal merupakan langkah strategis untuk mengurangi kerentanan pangan di kawasan perkotaan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan masyarakat melalui inovasi pangan dan program seperti urban farming. Pendekatan ini sejalan dengan konsep food resilience, yang mendorong kemandirian pangan mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas.

Kendati demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada aspek produksi dan distribusi pangan, sementara peran pemerintah sebagai pengelola kebijakan dan lembaga koordinatif belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh bagaimana pemerintah Kota Tangerang menjalankan kebijakan peningkatan ketahanan pangan secara efektif dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep teoritis terkait peran pemerintah dalam mengimplementasikan peningkatan ketahanan pangan di Kota Tangerang, berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen akademik dan kebijakan yang membahas topik yang sama atau berkaitan erat.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel konferensi, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan daerah Kota Tangerang, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang, serta sumber daring terpercaya lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, menyeleksi, dan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik ketahanan pangan dan peran pemerintah daerah.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari literatur untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis meliputi: (1) identifikasi konsep ketahanan pangan dan peran pemerintah daerah; (2) penelaahan program dan kebijakan pemerintah Kota Tangerang terkait ketahanan pangan; (3) analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori dan temuan empiris; dan (4) penarikan kesimpulan mengenai efektivitas peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Tangerang.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari sumber yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai topik yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan

### **Peran Pemerintah Kota Tangerang dalam Program Ketahanan Pangan**

Pemerintah Kota Tangerang memainkan peran sentral dalam memperkuat ketahanan pangan perkotaan melalui kebijakan dan program yang terstruktur. Salah satu inovasi utama adalah program urban farming dengan 1.000 lubang tanam hidroponik, yang memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan kosong sebagai media produksi pangan lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.

Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program, termasuk aturan terkait penggunaan lahan, standar keamanan pangan, dan distribusi hasil produksi. Kebijakan ini memastikan program berjalan sesuai prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan norma sosial serta budaya masyarakat perkotaan.

Selain itu, pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana produksi, pelatihan teknis, dan pendampingan intensif kepada masyarakat. Pendampingan ini penting untuk membangun kapasitas warga dalam mengelola sistem hidroponik, memahami teknik bercocok tanam modern, serta memaksimalkan hasil produksi agar sesuai dengan kebutuhan pangan keluarga dan komunitas.

Peran koordinatif juga menjadi kunci, di mana pemerintah bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat jaringan distribusi pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan pangan lokal, sehingga program dapat menjangkau lebih banyak warga.

Monitoring dan evaluasi secara rutin dilakukan untuk menilai efektivitas program, mendeteksi kendala, serta menyusun strategi penyesuaian agar program lebih adaptif terhadap dinamika perkotaan. Pendekatan yang terintegrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

### **Faktor Pendukung Implementasi Program Ketahanan Pangan**

Keberhasilan program urban farming didukung oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, dukungan pemerintah melalui regulasi yang jelas, penyediaan sarana produksi, dan pelatihan teknis menjadi landasan penting bagi masyarakat dalam mengembangkan pangan lokal. Dukungan ini menciptakan kepastian hukum dan teknis, sehingga masyarakat dapat melaksanakan program dengan lebih percaya diri. Kedua, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung utama. Kesadaran warga terhadap pentingnya kemandirian pangan mendorong keterlibatan mereka dalam menanam, merawat, dan memasarkan hasil produksi. Partisipasi ini juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program, sehingga keberlanjutan urban farming dapat lebih terjamin.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi pendukung penting. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal bekerja sama untuk memperkuat distribusi pangan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Sinergi ini memungkinkan pemanfaatan lahan terbatas secara optimal dan menjangkau lebih banyak warga di kawasan perkotaan. Inovasi teknologi, khususnya sistem hidroponik, memungkinkan produksi pangan di lahan terbatas sekaligus mendukung diversifikasi pangan lokal. Masyarakat dapat menanam sayuran dan tanaman pangan lainnya yang memiliki nilai gizi tinggi, sehingga mendukung kebutuhan pangan sehat bagi keluarga dan komunitas.

Pendekatan ini sesuai dengan konsep food resilience, yang menekankan kemandirian pangan mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas. Kombinasi dukungan teknologi, regulasi, dan partisipasi masyarakat menjadikan ketahanan pangan perkotaan lebih kuat dan berkelanjutan, mampu menghadapi fluktuasi pasokan dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

### **Faktor Penghambat Implementasi Program Ketahanan Pangan**

Meskipun berhasil, program urban farming menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan lahan menjadi tantangan utama, karena banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi permukiman atau fasilitas umum, sehingga ruang untuk produksi pangan terbatas. Hal ini memaksa pemerintah untuk mencari lahan alternatif atau memaksimalkan lahan terbatas melalui teknologi hidroponik. Kesulitan teknis muncul karena sebagian masyarakat belum terbiasa dengan metode bercocok tanam modern. Pendampingan intensif diperlukan agar warga dapat memahami teknik penanaman, pemupukan, dan perawatan tanaman dengan benar, sekaligus meminimalkan risiko gagal panen.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran, tenaga ahli, dan sarana pendukung, membatasi cakupan program. Keterbatasan ini dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan program, terutama jika terjadi gangguan pada distribusi atau produksi pangan. Adaptasi masyarakat terhadap inovasi baru masih relatif rendah. Dibutuhkan strategi edukatif, motivatif, dan insentif agar warga tertarik mengadopsi teknologi baru, memahami manfaat jangka panjang, dan memanfaatkan hasil produksi secara optimal.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan perkotaan membutuhkan strategi holistik yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik. Keberhasilan program sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait.

### **Pembahasan Strategi Ketahanan Pangan Perkotaan**

Hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator, serta pada partisipasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat distribusi, akses, dan pemanfaatan pangan lokal secara merata.

Integrasi kebijakan publik, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat terbukti mampu meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Program urban farming hidroponik menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif dalam memperkuat ketahanan pangan perkotaan. Kendala seperti keterbatasan lahan, kesulitan teknis, dan adaptasi masyarakat dapat diatasi melalui strategi multi-dimensi, termasuk edukasi masyarakat, inovasi teknologi yang sesuai, penyediaan sumber daya yang memadai, serta regulasi yang mendukung.

Pendekatan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya penghapusan kelaparan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Ketahanan pangan perkotaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta.

Dengan strategi ini, program ketahanan pangan Kota Tangerang dapat dijadikan model bagi kota lain untuk menghadapi urbanisasi, alih fungsi lahan, dan tantangan distribusi pangan. Pendekatan integratif ini meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola pangan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

### **D. Kesimpulan**

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga distribusi, aksesibilitas, dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Di Kota Tangerang, tantangan ketahanan pangan muncul akibat alih fungsi lahan pertanian, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang mendukung ketahanan pangan perkotaan. Pemerintah Kota Tangerang memainkan peran sentral sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator melalui program urban farming dengan 1.000 lubang tanam hidroponik. Program ini meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, memanfaatkan lahan terbatas, dan memperkuat distribusi serta akses pangan lokal. Dukungan berupa regulasi yang jelas, sarana produksi, pelatihan teknis, dan pendampingan intensif menjadi faktor utama keberhasilan program.

Keberhasilan program juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor, termasuk sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat. Sinergi ini memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendorong diversifikasi pangan lokal melalui inovasi teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep food resilience yang menekankan kemandirian pangan mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas. Meskipun demikian, program menghadapi hambatan seperti keterbatasan lahan, kesulitan teknis, keterbatasan sumber daya, serta adaptasi masyarakat terhadap teknologi baru.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan perkotaan memerlukan strategi holistik yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik. Secara keseluruhan, integrasi kebijakan publik, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan perkotaan secara berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya memperkuat ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan, tetapi juga dapat menjadi model bagi kota lain dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan alih fungsi lahan.

## E. Referensi

- Adha, A., & Suseno, S. H. (2020). Food consumption pattern and its contribution to nutrient adequacy ratio of Sukadamai villagers. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(6), 988-995.
- Aisyah, S., Azinar, M., & Hadisaputro, S. (2020). Ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 16(2), 179-186.
- Aisyah, S., Azinar, M., & Hadisaputro, S. (2020). Ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, 16(2), 179-186.
- Aulia, A. R. (2025). Penguatan Ketahanan Pangan dan Strategi Penyesuaian Ekonomi Rumah Tangga di Desa Gandarum melalui Diversifikasi Pangan Lokal Menjelang Ramadhan. *ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 45-49.
- Aulia, A. R. (2025). Penguatan ketahanan pangan dan strategi penyesuaian ekonomi rumah tangga di Desa Gandarum melalui diversifikasi pangan lokal menjelang Ramadhan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*. <https://ejurnal.edumedia.or.id/abdinusantara/article/view/13>
- Azhar, A. L., Suliyanto, Chamidah, N., Ana, E., & Amelia, D. (2023). Pemodelan indeks ketahanan pangan di Indonesia berdasarkan pendekatan regresi logistik ordinal data panel efek acak. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 29-50.
- Budiawati, Y., & Natawidjaja, R. S. (2020). Situasi dan gambaran ketahanan pangan di Provinsi Banten berdasarkan peta FSVA dan indikator ketahanan pangan. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(2), 187-204.
- Fauzi, N., & Stiawati, T. (2024). Inovasi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 52-70.
- Fauzi, N., Stiawati, T., & Arenawati. (2023). Ketahanan pangan dan pertanian perkotaan: Studi kasus kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin*. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7363>
- Fauzi, N., Stiawati, T., & Arenawati. (2023). Ketahanan pangan dan pertanian perkotaan: Studi kasus kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin*.
- Fauzi, N., Stiawati, T., & Arenawati. (2023). Ketahanan pangan dan pertanian perkotaan: Studi kasus kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Hasanuddin*. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7363>
- Fauzi, N., Stiawati, T., & Arenawati. (n.d.). Distribusi dan kebijakan ketahanan pangan nasional. *PANGAN, Perum BULOG*. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/3452>
- Firdaus, M. (2021). Disparitas harga pangan strategis sebelum dan saat pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(2), 107-120.
- Hanafie, R. (2010). Peran pangan pokok lokal tradisional dalam diversifikasi konsumsi pangan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 4(2), 1-7.
- Helbawanti, O., Saputro, W. A., & Ulfa, A. N. (2021). Pengaruh harga bahan pangan terhadap inflasi di Indonesia. *Agrisaintifika Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 5(2), 107-116.
- Miyasto, M. (2020). Strategi ketahanan pangan nasional guna meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 2(1), 17-34.

- Poernomo, A., & Winarto, H. (2020). Kemampuan produksi sumber pangan pokok dan non biji-bijian terhadap ketahanan pangan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 1411-1977.
- Pujiati, S., Pertiwi, A., Silfia, C. C., Ibrahim, D. M., & Hafida, S. N. (2020). Analysis of availability, affordability and utilization of food in supporting the achievement of community food security in Central Java Province. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2), 123-133.
- Rezeki, A. P. T., & Frinaldi, A. (2024). Strategi Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang dalam Menjaga Keberlanjutan Lahan dan Pangan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(2), 204-214.
- Rhofita, E. I. (2022). Optimalisasi sumber daya pertanian Indonesia untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 81-99.
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35-48.
- Wibowo, E. T. (2020). Pembangunan ekonomi pertanian digital dalam mendukung ketahanan pangan (studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204-228.
- Widodo, E. T. (2024). Pembangunan ekonomi pertanian digital dalam mendukung ketahanan pangan (Studi di Kabupaten Sleman). *Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22183>